

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

Transjakarta Ogah Beri Insentif OK-Otrip

Tarif rupiah per kilometer program itu masih menunggu hasil kajian badan lelang.

Gangsa Parikesit

gangsa@tempo.co.id

JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tidak akan memberikan insentif kepada pengusaha angkutan kota yang belum bergabung dengan program One Kartis, One Trip atau OK-Otrip. Kepala Humas Transjakarta, Wibowo, menuturkan perlu dasar hukum yang jelas dalam pemberian insentif. "Tidak bisa diberikan sembarang maupun sebaliknya," ujarnya kepada *Tempo*, Selasa.

Wibowo mengatakan, saat ini tarif kerja sama yang ditawarkan kepada pengusaha angkutan kota dalam program OK-Otrip alat sebesar Rp 3.749 per kilometer. Nilai itu mengacu pada sejumlah aspek, seperti biaya bahan bakar dan gaji sopir sebesar rupiah minimum provinsi, Rp 3.6 juta per bulan. "Angka ini didapatkan dengan melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dalam penghitungannya," tuturnya.

Uji coba OK-Otrip semula berlangsung pada 15 Januari-15 April lalu. Setelah masa uji coba itu, program seharusnya langsung diterapkan. Namun masa uji coba diperpanjang hingga 15 Juli lalu.

Senin lalu, pemerintah DKI Jakarta memutuskan memperpanjang kembali uji coba OK-Otrip. Perpanjangan itu dilakukan karena Badan Pengadaan

Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI tengah menghitung tarif kerja sama rupiah per kilometer.

OK-Otrip merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur yang lalu. Anies menjanjikan tarif tunggal angkutan Rp 3.000 sampai tujuan.

Hingga saat ini Transjakarta baru bisa bekerja sama dengan Koperasi Wahana Kalpika (WK) dan Rudi Lubis Padahal pemerintah DKI menargetkan 11 koperasi angkutan kota bergabung dengan program itu.

Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafrihuri Simungan, mengusulkan tarif kerja sama program OK-Otrip sekitar Rp 4.100-4.200 per kilometer. Menurut dia, tarif kerja sama yang ditawarkan Transjakarta belum menguntungkan bagi sebagian operator. Hal yang menyebabkan jumlah operator yang bergabung dengan program itu masih sedikit.

Ketua Koperasi Kolam, Petrus Lukimin, mengungkapkan hal serupa. Dia mengusulkan agar Transjakarta meminta tambahan *public service obligation* (PSO) untuk meningkatkan besaran tarif rupiah per kilometer dalam program OK-Otrip. Pada tahun ini perusahaan daerah itu mendapat PSO sebesar Rp 3,2 triliun. "PSO-nya diperbesar saja, kan (OK Otrip) bersih," ujarnya.

Pelaksana tugas BPPBJ

DKI Jakarta, Blesnaniyana, mengatakan masih mengkaji elektivitas dan kesesuaian tarif rupiah per kilometer dengan kondisi pasar. Dia menargetkan perhitungan itu bisa segera selesai.

Wibowo siap mengikuti hasil penghitungan tarif rupiah per kilometer yang tengah dihitung BPPBJ. "Bila ada perubahan, akan kami ikuti," tuturnya.

Gubernur Anies Baswedan menuturkan target OK-Otrip tidak hanya mengintegrasikan angkutan kota dengan Transjakarta. Pemerintah juga menargetkan peningkatan standar pelayanan minimal angkutan umum melalui program itu.

Selain itu, kata Anies, pemerintah DKI berkomitmen menutup selisih antara biaya operator angkutan kota dan penemasannya. "Kalau terlalu kecil (tarif rupiah per kilometer), operator bisa mati. Tapi kalau terlalu besar, uang pajak terbuang percuma. Jadi, harus menemukan angka yang pas," ujarnya. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas Indopos	Sindo Pos Kota	Tempo Warta Kota
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

Transjakarta Ogah Beri Insentif OK-Otrip

